

Peran Dinas Koperasi Palembang Dalam Evaluasi Dan Peningkatan UMKM Di Seberang Ulu

Muhammad Rasyid Ridho, Choiriyah

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email : m.rasyidridho34@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menyelidiki peran Dinas Koperasi Kota Palembang dalam menilai dan meningkatkan kinerja UMKM di Seberang Ulu. Meskipun UMKM sering menghadapi berbagai hambatan seperti akses permodalan, pembinaan, dan pemasaran, mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi Kota Palembang memiliki peran dalam beberapa hal. Ini termasuk mengadakan pelatihan kewirausahaan, bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan akses ke modal, dan mengajarkan pengelolaan usaha. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kolaborasi antar stakeholder, dan tingkat partisipasi yang rendah dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini menyarankan peningkatan alokasi anggaran, penggunaan teknologi digital dalam pembinaan, dan peningkatan kolaborasi lintas sector untuk mengoptimalkan pemberdayaan UMKM di wilayah Seberang Ulu.

Kata Kunci: *UMKM, Dinas Koperasi, Seberang Ulu, Evaluasi, Peningkatan, Pemberdayaan.*

Abstract

This article investigates the role of the Cooperative Office of Palembang City in evaluating and enhancing the performance of Micro, Small, and Medium Enterprises UMKM in the Seberang Ulu region. UMKM play a significant role in local economic growth despite facing challenges such as limited access to capital, inadequate training, and marketing difficulties. This study employs a descriptive qualitative method, gathering data through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the Cooperative Office of Palembang City

contributes to organizing entrepreneurship training, facilitating access to capital through partnerships with financial institutions, and providing guidance on business management. However, several challenges remain, including budget limitations, a lack of stakeholder collaboration, and low participation levels among UMKM. To address these challenges, the study recommends increasing budget allocations, leveraging digital technology in training programs, and strengthening cross-sector collaboration to optimize UMKM empowerment in the Seberang Ulu region.

Keywords: *UMKM, Cooperative Office, Seberang Ulu, Evaluation, Empowerment, Collaboration.*

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah modal bagi suatu Negara dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kuznet (1995) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu Negara mencerminkan adanya kenaikan kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya serta meningkatnya pendapatan perkapita penduduknya. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi sebuah daerah, termasuk Kota Palembang. UMKM adalah pilar ekonomi karena mereka menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), terutama di wilayah Seberang Ulu, yang memiliki karakteristik sosial ekonomi dan demografi yang berbeda. Meskipun demikian, UMKM sering menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses ke modal, sumber daya manusia yang buruk, dan ketidakmampuan untuk memanfaatkan teknologi digital untuk membantu pertumbuhan bisnis. (Anggarini, 2021)

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong perkembangan ekonomi di tingkat lokal. Meskipun demikian, banyak pelaku UMKM menghadapi kendala besar dalam memperoleh akses modal, terutama dari lembaga keuangan formal. Hambatan Dalam menghadapi tantangan ini, keberadaan Dinas Koperasi Kota Palembang menjadi penting sebagai institusi yang berperan dalam memberikan dukungan kepada UMKM, baik melalui program pelatihan, fasilitasi akses ke lembaga keuangan, maupun pembinaan teknis lainnya. Evaluasi terhadap peran Dinas Koperasi dalam mendukung UMKM di wilayah Seberang Ulu diperlukan untuk

mengidentifikasi efektivitas program yang telah dilaksanakan sekaligus menemukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan pemberdayaan UMKM di masa depan.(Wahyudi et al., 2024)

Di Kota Palembang, wilayah Seberang Ulu memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi potensi maupun tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Sebagian besar UMKM di wilayah ini beroperasi dalam sektor informal, seperti perdagangan tradisional, pengolahan makanan, dan kerajinan. Kendati potensi ini cukup menjanjikan, masalah klasik seperti kesulitan mendapatkan modal usaha, minimnya literasi keuangan, dan kurangnya akses ke pasar modern masih menjadi kendala utama yang menghambat perkembangan UMKM. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah melalui Dinas Koperasi menjadi sangat penting dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan tersebut. Dinas Koperasi Kota Palembang sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mendukung pengembangan UMKM memiliki sejumlah program strategis. Program-program ini meliputi pelatihan kewirausahaan, pemberian pendampingan usaha, hingga fasilitasi akses ke sumber pembiayaan melalui kerja sama dengan lembaga perbankan maupun non-perbankan. Namun, efektivitas program-program ini masih perlu dievaluasi, mengingat berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran pemerintah, kurangnya sinergi antar-stakeholder, serta rendahnya tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam kegiatan pembinaan.(Ida Ayu Anika Mahayani et al., 2024)

Melalui penelitian ini, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran Dinas Koperasi Kota Palembang dalam mendukung UMKM di wilayah Seberang Ulu, khususnya dalam menghadapi tantangan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengoptimalkan pemberdayaan UMKM di masa mendatang. Dengan memanfaatkan pendekatan berbasis

teknologi digital dan memperkuat kolaborasi lintas sektor, diharapkan UMKM di wilayah Seberang Ulu dapat meningkatkan daya saingnya, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana peran Dinas Koperasi Kota Palembang dalam membantu UMKM di Seberang Ulu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan pemberdayaan UMKM melalui kolaborasi lintas sektor dan inovasi berbasis teknologi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara rinci peran Dinas Koperasi Kota Palembang dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Seberang Ulu. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM serta program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih holistik dari berbagai perspektif, termasuk para pelaku UMKM, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini dilakukan di wilayah Seberang Ulu, Kota Palembang, yang memiliki sejumlah UMKM dengan potensi ekonomi yang cukup besar.

Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik sosial ekonomi yang unik, serta tantangan dan peluang tertentu dalam pengembangan UMKM. Waktu penelitian berlangsung selama tiga bulan, mulai dari tahap pengumpulan data hingga analisis hasil penelitian. Subjek penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok informan utama. Pertama, pegawai Dinas Koperasi Kota Palembang, yang memiliki peran langsung dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pemberdayaan UMKM. Kedua, pelaku UMKM di Seberang Ulu, yang menjadi sasaran program-program tersebut, dengan berbagai latar belakang dan jenis usaha. Ketiga, pemangku kepentingan lain yang relevan, seperti lembaga keuangan, komunitas UMKM, serta tokoh masyarakat yang dapat memberikan wawasan tambahan tentang kondisi UMKM di wilayah tersebut. (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018)

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menilai data guna mengetahui sejauh mana suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir suatu program, tetapi juga dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan program untuk memantau dan mengukur kemajuan secara berkesinambungan. Proses evaluasi ini mengharuskan adanya pengukuran yang jelas terhadap hasil dan dampak dari program yang dijalankan. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, evaluasi berfungsi untuk menilai apakah program-program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Palembang telah memberikan manfaat yang maksimal bagi UMKM dan apakah sumber daya yang digunakan telah dikelola dengan efisien. (Mirza & Putra, 2019)

Evaluasi juga merupakan langkah penting dalam identifikasi masalah yang muncul selama pelaksanaan program. Dalam hal ini, evaluasi bertindak sebagai alat untuk menemukan hambatan atau tantangan yang mungkin menghalangi keberhasilan suatu program. Dengan adanya evaluasi, Dinas Koperasi dapat segera mengambil langkah perbaikan untuk memperbaiki program yang kurang efektif. Proses ini juga membantu pihak yang terlibat dalam program untuk memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai tetap relevan dan dapat diukur dengan jelas.

Evaluasi merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pemberdayaan UMKM, karena memungkinkan Dinas Koperasi untuk menilai sejauh mana program yang telah dilaksanakan efektif dalam mendukung UMKM di Seberang Ulu. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari setiap program, serta untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak. Dalam hal ini, evaluasi

membantu Dinas Koperasi untuk mengetahui apakah strategi yang diterapkan sudah tepat sasaran atau perlu adanya perubahan. Tanpa evaluasi yang jelas, sebuah program pemberdayaan UMKM berisiko berjalan tanpa arah dan tidak memberikan dampak yang optimal bagi pelaku UMKM.(Nursam, 2017)

2. Tujuan dan Manfaat Evaluasi

a. Tujuan

Evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Kota Palembang. Salah satu tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam program pemberdayaan UMKM dapat tercapai. Misalnya, apakah pelatihan kewirausahaan yang diadakan berhasil meningkatkan keterampilan pengelolaan usaha bagi pelaku UMKM, atau apakah akses permodalan yang diberikan telah membantu mereka dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan demikian, evaluasi memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana program-program tersebut memberikan dampak yang diinginkan terhadap pelaku UMKM.(Mirza & Putra, 2019)

Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dari program pemberdayaan yang sedang dijalankan. Dengan melakukan evaluasi, Dinas Koperasi dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program. Dengan informasi ini, mereka dapat merumuskan strategi atau perbaikan yang lebih tepat untuk program-program berikutnya. Evaluasi juga membantu dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki atau menyesuaikan pelaksanaan program agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM.

b. Manfaat

Manfaat utama dari evaluasi adalah untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program pemberdayaan UMKM. Evaluasi memungkinkan Dinas Koperasi untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki, sehingga program-program pemberdayaan UMKM bisa berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Misalnya, jika ditemukan bahwa pelatihan tidak memberikan dampak yang signifikan, maka evaluasi akan mendorong

Dinas Koperasi untuk menyesuaikan materi pelatihan agar lebih relevan dengan kebutuhan UMKM di lapangan. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas program, serta memperbesar peluang keberhasilan pemberdayaan UMKM.

Evaluasi juga memberikan manfaat dalam hal pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal. Dalam proses evaluasi, dapat dilihat sejauh mana anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan UMKM digunakan secara efisien. Jika ditemukan adanya pemborosan atau ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran, evaluasi memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Dengan begitu, program-program pemberdayaan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, dan sumber daya yang terbatas dapat digunakan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelaku UMKM. Selain itu, manfaat lain dari evaluasi adalah meningkatkan akuntabilitas. Dinas Koperasi perlu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara dan efektivitas program-program yang dijalankan kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya. Evaluasi memberikan laporan yang jelas dan transparan mengenai kinerja program, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder terhadap program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan.(Nursam, 2017)

3. Tantangan dalam Pelaksanaan Program

Meskipun Dinas Koperasi telah menjalankan berbagai program untuk pemberdayaan UMKM, ada beberapa tantangan yang masih perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Dengan anggaran yang terbatas, Dinas Koperasi harus bijak dalam memilih program yang akan dilaksanakan dan memastikan bahwa program-program tersebut dapat memberikan dampak yang

maksimal bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan membantu Dinas Koperasi untuk mengevaluasi penggunaan anggaran dan menentukan prioritas program yang lebih efektif. Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya kolaborasi antar stakeholder. Pemberdayaan UMKM memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Namun, seringkali ada kurangnya koordinasi antara pihak-pihak ini, yang menghambat kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan UMKM (Gustiana, et.al, 2022). Evaluasi dapat memberikan gambaran tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan UMKM.(Ida Ayu Anika Mahayani et al., 2024)

Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi Kota Palembang, meskipun memiliki dampak positif, tidak lepas dari berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Tantangan ini datang dari berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan program, mulai dari sumber daya yang terbatas hingga masalah sosial dan kelembagaan yang ada.

a. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM adalah keterbatasan anggaran. Program pemberdayaan UMKM memerlukan biaya yang cukup besar untuk mendanai berbagai kegiatan, seperti pelatihan, penyuluhan, penyediaan fasilitas, serta pembiayaan bagi para pelaku UMKM. Dengan anggaran yang terbatas, Dinas Koperasi sering kali kesulitan dalam menjalankan program-program secara maksimal dan mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas program yang ada, karena tidak semua pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan bisa terlayani dengan baik. Di samping itu, sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi salah satu hambatan. Dinas Koperasi mungkin kekurangan tenaga ahli atau staf yang memiliki kompetensi untuk menjalankan berbagai program pemberdayaan UMKM. Kurangnya tenaga kerja yang terlatih dan memiliki pengetahuan dalam bidang pemberdayaan UMKM dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan program, yang pada akhirnya berdampak pada hasil yang ingin dicapai.

b. Kurangnya Koordinasi dan Kolaborasi Antar Stakeholder

Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai stakeholder yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, tetapi juga melibatkan banyak pihak, seperti lembaga keuangan, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Tanpa adanya kerja sama yang solid antara pihak-pihak ini, program pemberdayaan UMKM sering kali terhambat. Misalnya, lembaga keuangan yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM mungkin memiliki syarat yang ketat dan prosedur yang rumit, sehingga menghambat pelaku UMKM untuk mengakses modal. Jika ada kurangnya komunikasi yang efektif antara Dinas Koperasi dan lembaga keuangan, hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan pelaku UMKM dan produk pembiayaan yang ditawarkan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara seluruh pihak yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM agar tujuan program dapat tercapai lebih efektif.

c. Kurangnya Partisipasi dan Kepedulian dari Pelaku UMKM

Tantangan lainnya adalah kurangnya partisipasi dari pelaku UMKM dalam program pemberdayaan yang diselenggarakan. Meskipun program-program seperti pelatihan kewirausahaan atau pembinaan usaha dapat memberikan manfaat besar, beberapa pelaku UMKM mungkin tidak menyadari pentingnya mengikuti program-program tersebut. Alasan yang sering ditemui antara lain adalah keterbatasan waktu, terutama bagi UMKM yang sudah memiliki kesibukan dalam menjalankan usaha mereka sehari-hari, atau kurangnya informasi mengenai manfaat program. Kurangnya minat atau partisipasi dalam pelatihan dan program lainnya juga dapat dipengaruhi oleh faktor

budaya dan pola pikir pelaku UMKM. Beberapa pelaku UMKM mungkin merasa bahwa mereka sudah memiliki pengalaman cukup dalam mengelola usaha, sehingga tidak merasa perlu mengikuti pelatihan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan personal agar pelaku UMKM mau berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan yang diselenggarakan.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, Dinas Koperasi Kota Palembang perlu melakukan penyesuaian strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Evaluasi yang rutin dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder, termasuk pelaku UMKM itu sendiri, adalah kunci untuk merespons tantangan ini dengan lebih baik. Dengan upaya yang terkoordinasi dan sumber daya yang dikelola secara efisien, tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi, sehingga program pemberdayaan UMKM dapat mencapai hasil yang lebih maksimal.

4. Dampak Positif dari Program Pemberdayaan UMKM

Program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Palembang telah memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha di Seberang Ulu. Salah satu dampak utama adalah peningkatan kapasitas manajerial para pelaku UMKM, yang memungkinkan mereka untuk mengelola usaha mereka dengan lebih efisien dan profesional. Peningkatan keterampilan dalam hal pemasaran dan pengelolaan keuangan juga telah memberikan dampak yang signifikan, dengan banyak pelaku UMKM yang melaporkan adanya peningkatan dalam penjualan dan stabilitas keuangan usaha mereka. Selain itu, program pemberdayaan yang menyediakan akses pasar dan jaringan distribusi juga membantu UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Dengan adanya akses ke pasar yang lebih besar, pelaku UMKM dapat meningkatkan volume penjualan mereka dan memperluas pasar untuk produk mereka. Evaluasi terhadap dampak ini sangat penting untuk mengetahui program mana yang memberikan hasil yang terbaik dan mana yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. (Pengabdian & Global, 2024)

a. Peningkatan Kapasitas Manajerial dan Keterampilan

Salah satu dampak positif yang paling terlihat dari program pemberdayaan UMKM adalah peningkatan kapasitas manajerial pelaku UMKM. Program pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, seperti pelatihan manajemen usaha, pemasaran,

pengelolaan keuangan, dan inovasi produk, telah membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola usaha mereka. Pelaku UMKM yang sebelumnya kurang memahami aspek-aspek manajerial kini menjadi lebih terampil dalam mengatur keuangan, mengelola stok barang, dan membuat perencanaan bisnis yang lebih baik. Dengan adanya peningkatan keterampilan ini, banyak pelaku UMKM yang mulai menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan usaha mereka. Mereka lebih mampu mengatur strategi pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan kualitas produk, serta merencanakan pengembangan usaha ke depan. Sebagai hasilnya, pelaku UMKM dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih efisien dan profesional.

b. Peningkatan Akses ke Modal Usaha

Salah satu tantangan utama bagi pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal usaha. Melalui program pemberdayaan yang melibatkan lembaga keuangan, Dinas Koperasi telah memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses modal yang lebih mudah dan terjangkau. Program kemitraan dengan bank dan lembaga pembiayaan memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan dengan pinjaman konvensional (Ramadhany, et.al, 2023). Dengan akses ke modal yang lebih baik, pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha mereka, memperbesar kapasitas produksi, atau bahkan memperkenalkan produk baru. Dampak positif ini terlihat jelas dari banyaknya UMKM yang berhasil memperoleh pinjaman modal usaha dan menggunakannya untuk memperluas usahanya. Ini membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif.

5. Peningkatan Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Dampak positif lainnya dari program pemberdayaan UMKM adalah peningkatan kemandirian pelaku usaha. Program-program yang dilaksanakan tidak hanya memberikan bantuan modal atau pelatihan, tetapi juga memberikan dorongan bagi pelaku UMKM untuk lebih mandiri dalam mengelola usaha mereka. Hal ini mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan dalam situasi ekonomi yang berubah. Dengan meningkatnya kemandirian pelaku UMKM, ekonomi lokal di Seberang Ulu juga mengalami peningkatan. UMKM yang berkembang dengan baik akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, memperbaiki kualitas produk lokal, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak ini akan berkelanjutan karena semakin banyak pelaku UMKM yang dapat memperluas usaha mereka dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di sekitarnya.

dampak positif dari program pemberdayaan UMKM di Seberang Ulu sangat signifikan bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan keterampilan manajerial, akses modal, daya saing, pengelolaan keuangan, kemandirian, dan jaringan bisnis adalah beberapa contoh dampak positif yang dapat dirasakan oleh pelaku UMKM. Program pemberdayaan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi UMKM itu sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.

Simpulan

Program pemberdayaan UMKM yang dijalankan oleh Dinas Koperasi Kota Palembang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di wilayah Seberang Ulu. Dengan berbagai kegiatan seperti pelatihan kewirausahaan, pemberian akses modal, dan pengelolaan usaha, program ini berhasil meningkatkan kapasitas manajerial pelaku UMKM, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas akses pasar melalui strategi pemasaran yang lebih efektif. Namun, pelaksanaan program ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar stakeholder, serta rendahnya partisipasi pelaku UMKM. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya peningkatan alokasi

anggaran, kolaborasi yang lebih baik antar berbagai pihak, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan pembinaan dan promosi produk UMKM.

Dampak positif dari program pemberdayaan UMKM sangat signifikan, antara lain peningkatan keterampilan manajerial, pengelolaan keuangan, serta akses modal yang lebih baik. Selain itu, program ini juga membantu meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang lebih luas, membuka peluang ekspansi usaha, dan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui perbaikan dalam program pemberdayaan ini, diharapkan UMKM di Seberang Ulu dapat semakin berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Dengan demikian, Dinas Koperasi Kota Palembang harus terus berupaya meningkatkan efektivitas dan jangkauan program pemberdayaan UMKM untuk mencapai tujuan yang lebih optimal, menciptakan UMKM yang mandiri, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di pasar global.

Daftar Pustaka

- Anggarini, D. R. (2021). Kontribusi Umkm Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung 2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 345–355. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/indexDOI:https://doi.org/10.37676/ekonombis.v9i2.1462>
- Ida Ayu Anika Mahayani, I Putu Dharmanu Yudhartha, & Ni Putu Anik Prabawati. (2024). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dinas koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan. *Business and Investment Review*, 2(1), 95–107. <https://doi.org/10.61292/birev.96>
- Gustiana, N., Aravik, H., & Meriyati, M. (2022). Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(2), 341-350.

- Mirza, A. H., & Putra, A. (2019). Evaluasi Sistem Informasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palembang. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 6(4), 397. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2019641048>
- Nursam, N. (2017). Manajemen Kinerja. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 167–175. <https://doi.org/10.24256/kelola.v2i2.438>
- Pengabdian, J., & Global, M. (2024). 1, 2 1,2. 3(1).
- Ramadhany, N. P., Aravik, H., & Choirunnisak, C. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Pada Rozza Bakery Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*.
- Wahyudi, Saat, I., & Hidayat, M. M. (2024). Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Volume 3 Nomor 1 (2024) 1. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(1), 1–20.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>